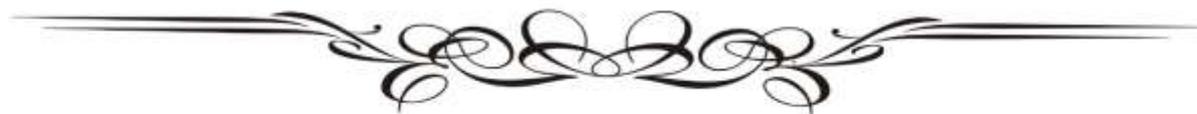


KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Rabu, 10 April 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Koran Tempo	10 April 2019	Pembebasan Lahan untuk ormalisasi Sungai Jalan Terus	Balai besar sungai dimintai menggunakan material yang bersifat alami, seperti pada program naturalisasi
2	Bisnis Indonesia (Hal, 8)	10 April 2019	6 Perusahaan Siap Masuk KEK Maloy	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mencatat ada enam perusahaan yang siap masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, sebaliknya masih ada investor yang lebih memilih untuk membuka penghiliran industry minyak sawit di Kota Bontang
3	Bisnis Indonesia (Hal, 7)	10 April 2019	Waskita Tunggu Lelang Investasi	PT Waskita Toll Road tengah menunggu pelelangan investasi pada proyek jembatan tol Balikpapan-Penajam yang diperkirakan menelan investasi hingga Rp 16,50 triliun
4	Bisnis Indonesia (Hal, 9)	10 April 2019	Investasi Diterget Tembus Rp 35 Triliun	Kawasan Ekonomi Khusus Bitung yang diresmikan pada pekan lalu diyakini akan membawa investasi sekitar Rp 3 triliun per tahun. Hingga saat ini, nilai investasi yang sudah tercatat mencapai sebesar Rp 3,8 triliun
5	Bisnis Indonesia (Hal, 9)	10 April 2019	Potensi Aspal Karet Besar	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa karet untuk campuran aspal atau aspal karet bisa dipergunakan untuk pemeliharaan jalan sepanjang 355,988 Km
6	Bisnis Indonesia (Hal, 8)	10 April 2019	Ruas Sumatra Selatan-Bengkulu Digeber	Pembangunan jalan tol Trans-Sumatra di suMATRA Selatan berlanjut. Pemerintah mulai menggeber pengerjaan di ruas provinsi itu hingga ke Bengkulu sepanjang 329,3 kilometer yang ditargetkan selesai pada 2023
7	Media Indonesia (Hal. 21)	10 April 2019	Sirip Tol Trans-Sumatra Mulai Digarap	Pengerjaan ruas tol Trans Sumatra di Pulau Sumatra hampir sebagian selesai. Terutama ruas Tol Bakauheuni ke Palembang yang akan dioperasikan Juni 2019.

Judul	Pembebasan Lahan untuk normalisasi Sungai Jalan Terus	Tanggal	10 April 2019
Media	Koran Tempo		
Resume	Balai besar sungai diminta menggunakan material yang bersifat alami, seperti pada program naturalisasi		

Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Sungai Jalan Terus

Balai Besar diminta menggunakan material yang bersifat alami.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah DKI Jakarta terus membebaskan lahan yang diperlukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane untuk normalisasi sungai. Namun pemerintah DKI meminta agar Balai Besar melakukan normalisasi dengan material yang bersifat alami seperti pada program naturalisasi.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yusmada Faizal, mengatakan pada tahun lalu anggaran pembebasan lahan untuk normalisasi yang terserap sebesar Rp 488 miliar. "Pada tahun ini juga diteruskan pembebasan lahan," katanya.

Pemerintah DKI tahun lalu membebaskan lahan di wilayah Jakarta Selatan, seperti Tanjung Barat, Pejaten Timur, dan Bukit Duri. Sedangkan lahan di wilayah Jakarta Timur

yang dibebaskan terletak di Gedong, Balekambang, Cawang, Kampung Melayu, dan Bidara Cina. Semuanya berada di bantaran Ciliwung.

Lahan yang telah dibebaskan di wilayah yang dialiri Ciliwung itu, kata Yusmada, lebih dari 200 bidang tanah dengan luas mencapai 13 hektare. "Saya sudah laporkan ke Kepala BBWSCC (Balai Besar) terkait pengadaan tanah untuk normalisasi Ciliwung itu," tuturnya.

Menurut Yusmada, pemerintah DKI telah menyurati Balai Besar pada 27 Agustus lalu perihal kelanjutan proyek normalisasi sungai. "Kami menyarankan agar pembangunan fisik menggunakan material alami dan ramah lingkungan," tuturnya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, kemarin.

Normalisasi sungai di Jakarta, salah satunya Ciliwung, mandek sejak 2017. Mandeknya proyek anti-sipasi banjir itu karena



Sungai Ciliwung di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, setelah dinormalisasi.

“Pada tahun ini juga diteruskan pembebasan lahan.”

—Yusmada Faizal
Asisten Pembangunan
dan Lingkungan Hidup DKI
Jakarta

pemerintah DKI lamban dalam proses pembebasan lahan.

Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memilih melakukan naturalisasi sungai. Hal itu ia kemukakan sejak masa kampanye pemilihan gubernur yang lalu. Anies menginginkan sungai-sungai di Jakarta ditata secara alami.

Ketimbang dibeton permanen, Anies mengusulkan agar tepian sungai dibuat berundak-undak dengan dinding penahan dari tanah atau batu kali. Agar kokoh, tanggul alami itu nanti ditanami pohon pengikat tanah.

Pejabat Pembuat Komitmen Naturalisasi Dinas Sumber Daya Air DKI

Jakarta, Yose Rizal, menuturkan naturalisasi dan normalisasi sungai itu saling melengkapi. Balai Besar bisa melakukan normalisasi sungai dengan memasang *sheet pile* atau beton di tepi sungai. “*Sheet pile* kan untuk mencegah dinding tanah longsor,” tuturnya.

Yose menjelaskan, naturalisasi kali dan waduk yang akan dilakukan pemerintah DKI akan menciptakan ruang terbuka hijau. “Jadi, masyarakat juga bisa menikmati sungai itu,” katanya.

Gubernur Anies menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara

Terpadu dengan Konsep Naturalisasi, pada 25 Maret lalu. Peraturan itu menyebutkan naturalisasi adalah cara mengelola prasarana sumber daya air melalui pengembangan ruang terbuka hijau dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, serta konservasi.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Bambang Hidayah, menjelaskan program normalisasi sungai yang dilakukan Balai Besar merupakan bagian dari naturalisasi. Namun ada beberapa lokasi sungai yang harus dilebarkan, karena lebar sungainya hanya sepuluh sampai 15 meter.

● JULNIS FIRMANSAH

Judul	6 Perusahaan Siap Masuk KEK Maloy	Tanggal	10 April 2019
Media	Binis Indonesia (Hal, 8)		
Resume	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mencatat ada enam perusahaan yang siap masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, sebaliknya masih ada investor yang lebih memilih untuk membuka penghiliran industry minyak sawit di Kota Bontang		

► KAWASAN INDUSTRI

6 Perusahaan Siap Masuk KEK Maloy

Bisnis, SAMARINDA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mencatat ada enam perusahaan yang siap masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, sebaliknya masih ada investor yang lebih memilih untuk membuka penghiliran industri minyak sawit di Kota Bontang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Irawansyah mengatakan, sudah ada enam perusahaan yang mengincar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Pemerintah daerah juga masih merumuskan soal pembebasan sewa lahan untuk para investor.

"Kami juga akan mengundang investor yang saat ini sudah ada. Cuma perlu kepastian mereka lebih lanjut kita ha-

rus sama-sama menyampaikan kepada investor untuk segera perencanaan industri apa yang dibuat di sana," ungkapnya, Selasa (9/4).

Dia menyatakan, Pemkab Kutai Timur juga akan mengumpulkan semua perusahaan kelapa sawit di daerah Kutai Timur untuk mau masuk ke KEK Maloy. Enam perusahaan itu ada yang dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

"Untuk permasalahan lahan air bersih nanti yang mengurus dari provinsi," jelasnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Provinsi Kalimantan Timur Abdullah Sani menyatakan, di Kawasan Industri Riil Bontang ada satu perusahaan yang siap membangun pabrik minyak goreng.

Pada Desember 2019 perusahaan itu mulai beroperasi.

Namun, ada beberapa permasalahan teknis perizinan yang belum diselesaikan. Meski demikian, Sani meyakinkan tidak ada permasalahan lahan karena perusahaan tersebut sudah memiliki kebun sawit sendiri.

"Dia sudah punya kebun, punya CPO, ini dia mau bikin industri minyak goreng. Pengolahan minyak goreng," kata Sani.

Sani mengungkapkan, perusahaan tersebut tidak berniat masuk ke KEK Maloy. Perusahaan punya penghitungan biaya yang lebih murah dan menguntungkan jika tetap membuka pabrik di Bontang, ketimbang di KEK Maloy.

"Dia [perusahaan] lebih tahu. Untungnya di situ. Saya juga

tahu, dia sudah dapat lokasi di situ. Investor ini biasanya lebih tahu dari kita. Kalau dia lihat peluang lebih bagus di situ, tentu ada sisi strategis lokasi dan ekonomi," paparnya.

Sani berjanji akan mempermudah perizinan untuk perusahaan industri pengolahan kelapa sawit. Dengan demikian bisa lebih optimal pencapaian realisasi investasi di Kaltim.

Sani juga menyatakan, tahun ini pihaknya ingin menargetkan lebih banyak investor masuk ke Bumi Etam membidik sektor riil. Beberapa di antaranya sektor migas dan logistik melalui layanan *direct call*. Pasalnya, Pelabuhan di Samarinda dan perairan di Kaltim sangat potensial untuk melakukan *direct call* atau ekspor-impor langsung.

(Gloria F.K. Lawi)

Judul	Investasi Diterget Tembus Rp 35 Triliun	Tanggal	10 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Hal, 9)		
Resume	Kawasan Ekonomi Khusus Bitung yang diresmikan pada pekan lalu diyakini akan membawa investasi sekitar Rp 3 triliun per tahun. Hingga saat ini, nilai investasi yang sudah tercatat mencapai sebesar Rp 3,8 triliun		

► KEK BITUNG

Investasi Ditarget Tembus Rp35 Triliun

Bisnis, MANADO — Kawasan Ekonomi Khusus Bitung yang diresmikan pada pekan lalu diyakini akan membawa investasi sekitar Rp3 triliun per tahun. Hingga saat ini, nilai investasi yang sudah tercatat mencapai sebesar Rp3,8 triliun.

Ilman A. Sudarwan
 ilman.alanfon@bisnis.com

Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Enoch Suharto mengatakan bahwa sampai dengan 2030 diperkirakan total investasi yang masuk ke kawasan tersebut mencapai Rp35 triliun. Total investasi yang sudah masuk hingga kini baru mencapai sekitar 10%.

"Sekarang yang sudah *committed* ke kami, terdata itu sekitar Rp3,8 triliun, sudah sekitar 10%. Ini untuk KEK yang Bitung, *kan* targetnya Rp35 triliun," katanya kepada *Bisnis*, belum lama ini.

Dia menjelaskan, meski KEK Bitung telah ditetapkan sejak 3 tahun lalu, persoalan lahan menjadi salah satu kendala perkembangan kawasan tersebut. Hingga saat ini, dari 534 hektare KEK yang ditetapkan, baru 92,6 hektare yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL).

Persyaratan dikeluarkannya peraturan pemerintah (PP) KEK pada 2014 memang hanya mensyaratkan izin dan penetapan lokasi.

Proses pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur dasar selanjutnya mesti dilakukan selama 3 tahun setelah penetapan status KEK.

"Memang selama 3 tahun itu terjebak dalam permasalahan lahan, 92,6 hektare itu berbebit-belit dan sangat lama karena ada klaim-klaim dari masyarakat, jadi baru terbit mungkin 2018. Tapi, infrastruktur *kan* dibantu juga, sudah dibangun ada kawasan ada jalan, ada kantornya," katanya.

Luasan lahan tersebut tersebut, lanjutnya, dimiliki oleh pemerintah daerah dan siap ditawarkan kepada investor.

► Dari tiga investor yang sudah masuk ke KEK Bitung saat ini, baru PT Futai yang mulai membangun pabriknya dan berinvestasi.

Kendati demikian, dia mengatakan bahwa beberapa investor saat ini tengah mengurus pembebasan lahan lain dan mendapatkan HPL.

"Mereka [investor] membebaskan lahan juga, mereka dalam proses sertifikasi ke HPL dulu. Karena ini pengusulnya pemerintah, nanti di-HPL-kan dulu ke pemerintah, nanti HGB-nya [Hak Guna Bangunan] jadi punya mereka, investor," jelasnya.

Dia mengatakan, dari tiga investor yang sudah masuk ke KEK Bitung saat ini baru PT Futai yang mulai membangun pabriknya dan berinvestasi di sana. Adapun, PT Pasific Ocean Fishery, dan PT Indojoya Fortuna disebutkan masih mengurus proses perizinan.

"Mereka bukan mundur, tapi masih ada beberapa persyaratan yang masih perlu mereka penuhi, karena kami juga ingin memastikan kalau mereka masuk itu mereka siap pembiayaannya juga, harus jelas, mereka juga sekarang sedang urus di OSS," katanya.

Selain itu, ada beberapa para pelaku industri yang sudah berada di Bitung sebelum KEK ditetapkan yang akan turut menikmati fasilitas *tax allowance*. Namun demikian, untuk memperoleh fasilitas *tax holiday* mereka diminta menambah investasinya.

"Misalnya, sudah punya pabrik A, terus pengembangan di pabrik B, *nah* ini yang akan mendapatkan fasilitas *tax holiday*-nya. Nilainya tentu diatur, kalau investasinya Rp500 miliar—Rp1 triliun itu mendapatkan

tax holiday 15 tahun, kalau di atas Rp1 triliun itu 25 tahun," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan bahwa pihaknya telah meminta Kementerian Bidang Perekonomian untuk menyetujui perluasan luasan wilayah KEK Bitung. Menurutnya, beberapa pengusaha telah memiliki lahan berstatus *clean and clear* di luar area yang ditetapkan.

"Sudah 500 hektare sudah tersedia, makanya saya sudah minta Pak Darmin [Menteri Koordinator Bidang Perekonomian], *kan* yang ditetapkan awal sekitar 500 hektare, ada 500 hektare sudah milik investor tapi bukan di penetapan. Pak Darmin tinggal ubah, perluas wilayahnya, dia sudah setuju," jelasnya.

KEK TANJUNG PULISAN

Sulawesi Utara juga tengah memperjuangkan pengusulan KEK Pariwisata yang akan berlokasi di Tanjung Pulisan. Namun demikian, Enoch mengatakan bahwa hingga saat ini Dewan KEK Nasional belum menerima usulan resmi dari pemerintah provinsi Sulawesi Utara.

"Secara formal itu belum masuk ke Dewan KEK Nasional, karena *kan* suratnya dari badan usaha itu ke Bupati dulu, ke Gubernur, baru ke Dewan. Saya belum terima, dokumen *file* tanahnya untuk verifikasi," katanya.

Dia juga mengatakan bahwa untuk menghindari persoalan lahan yang sama seperti di Bitung, Dewan KEK akan lebih selektif dan ketat dengan persyaratan penguasaan lahan. Pengusulan KEK akan disetujui apabila lahan telah benar-benar dikuasai. "Karena kami sekarang sangat ketat dengan penguasaan lahan dulu, supaya tidak seperti ini [KEK Bitung]. Sekarang kami tetapkan KEK kalau lahan sudah dikuasai, kalau tidak dikuasai pasti tidak akan lolos," katanya.

Menurutnya, dengan belum diterimanya dokumen usulan secara formal oleh Dewan KEK Nasional, ekspektasi Kementerian Pariwisata dan pengusul yang mengharapkan kawasan KEK Tanjung Pulisan dapat ditetapkan pada Juni akan sulit terwujud. □

Judul	Potensi Aspal Karet Besar	Tanggal	10 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Hal, 9)		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa karet untuk campuran aspal atau aspal karet bisa dipergunakan untuk pemeliharaan jalan sepanjang 355,988 Km		

Potensi Aspal Karet Besar

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat menyatakan bahwa karet untuk campuran aspal atau aspal karet bisa digunakan untuk pemeliharaan jalan sepanjang 355.988 kilometer.

Kasubdit Standar & Pedoman Direktorat Preservasi Jalan Ditjen Bina Marga Nanang Handono Prasetyo mengatakan bahwa penggunaan aspal karet menjadi alternatif pemakaian aspal buton dan akan dilakukan sesuai dengan spesifikasi jalan.

"Sekarang penggunaan karet sudah semakin serius dan nuansanya nuansa kerakyatan karena pengadaannya langsung ke petani," ujarnya, Selasa (9/4).

Menurut Nanang, Kementerian PUPR sudah melakukan pembelian karet ke petani untuk bahan pencampuran aspal.

Di Sumatra, panjang jalan yang berpotensi dipelihara dengan aspal karet mencapai 181.986 km, Jawa 107.095 km, dan Kalimantan 66.907 km.

Jalan sepanjang itu terdiri atas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Panjang jalan nasional yang berpotensi dirawat dengan aspal karet adalah 25.549 km atau lebih dari separuh panjang jalan nasional. Kemudian, jalan provinsi yang juga berpotensi dilapisi aspal karet 29.719 km, sedangkan 296.485 km jalan kabupaten berpotensi menggunakan aspal karet.

Nanang menuturkan bahwa Kementerian PUPR sudah menerbitkan regulasi mengenai norma, standar, prosedur, dan manual penggunaan karet. @Rivva

Maulana

Judul	Ruas Sumatra Selatan-Bengkulu Digeber	Tanggal	10 April 2019
Media	Binis Indonesia (Hal, 8)		
Resume	Pembangunan jalan tol Trans-Sumatra di suMATRA Selatan berlanjut. Pemerintah mulai menggeber pengerjaan di ruas provinsi itu hingga ke Bengkulu sepanjang 329,3 kilometer yang ditargetkan selesai pada 2023		

► TOL TRANS-SUMATRA

Ruas Sumatra Selatan-Bengkulu Digeber

Bisnis, MUARA ENIM — Pembangunan jalan tol Trans-Sumatra di Sumatra Selatan berlanjut. Pemerintah mulai menggeber pengerjaan di ruas provinsi itu hingga ke Bengkulu sepanjang 329,3 kilometer yang ditargetkan selesai pada 2023.

Dinda Wulandari
dinda.wulandari@binis.com

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Muljono mengatakan bahwa pembangunan ruas tersebut seiring dengan ruas Bakauheni—Palembang yang hampir selesai. Dia menilai, fungsi tol tersebut dapat maksimal apabila ada ruas lainnya, salah satunya Simpang Indralaya, Sumsel—Bengkulu.

"Tol dari Bakauheni hingga ke Palembang ditarget selesai Juni 2019, supaya lebih maksimal kita perlu membangun ruas sirip dari tol itu, yakni Sumsel—Bengkulu," katanya saat acara Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Tol Muara Enim—Simpang Indralaya dan Ruas Jalan Tol Muara Enim—Lubuklinggau di Kabupaten Muara Enim, Sumsel, Selasa (9/4).

Adapun, pembangunan ruas Sumsel—Bengkulu yang ditaksir menelan investasi Rp85,51 triliun itu terbagi menjadi tiga seksi, yakni Muara Enim—Simpang Indralaya sepanjang 119 kilometer, Muara Enim—Lahat—Lubuk Linggau sepanjang 114,5 km, dan Lubuk Linggau—Curup—Bengkulu sepanjang 95,8 km.

Basuki berharap agar pembangunan ruas tol yang terdiri dari delapan simpang susun itu bisa cepat selesai dan tidak terkendala pembebasan lahan.

Menteri mencontohkan, pengerjaan ruas tol di Lampung yang dinilai cepat karena tidak terhambat proses ganti rugi lahan.

"Lampung itu cepat sekali. Ini contoh yang baik, pembebasan lahannya berupa ganti untung. Bukan soal harga yang menjadi masalah, melainkan biasanya ada kepemilikan yang tumpang tindih," jelasnya.

Terkait dengan penetapan lokasi jalan tol, Basuki meminta agar pemda setempat dapat memberikan masukan sehingga diharapkan jalan tol itu dapat menghubungkan ruas jalan dengan kawasan industri.

"Tidak ada gunanya tol itu lewat-lewat saja. Harus ada gunanya. Salah satunya

► PT Utama Karya menargetkan seluruh dari tiga seksi ruas tol Simpang Indralaya-Bengkulu itu dapat difungsionalkan pada 2023.

dengan menghubungkan jalan tol dengan kawasan industri," kata Basuki.

DUKUNGAN PEMDA

Direktur Utama PT Utama Karya (Persero) Bintang Perbowo mengharapkan agar pemerintah daerah mendukung pembangunan tol tersebut melalui kemudahan pembebasan lahan.

"Kami minta bantuan terutama kepada Gubernur Sumsel dan Gubernur Bengkulu juga bupati dan wali kota agar mau mendukung pembebasan lahan. Untuk anggarannya HK yang siapkan," katanya.

Memurut Bintang, pengerjaan tahap awal masih berkenaan dengan pembebasan lahan yang ditarget beres pada tahun ini. Selanjutnya, perseroan akan masuk tahap konstruksi paling cepat Oktober 2019. Perusahaan menargetkan seluruh dari tiga seksi ruas tol Simpang Indralaya—Bengkulu itu dapat difungsionalkan pada 2023.

"Pengerjaan tol ini sesuai dengan pembebasan lahan. Jika pembebasan lahan cepat dan tanpa hambatan maka pengerjaan pun bisa cepat," ujarnya.

Bintang menjelaskan, sesuai dengan pemetaan yang dilakukan pihaknya, kondisi tanah yang akan dibangun untuk tol beragam. Ada tanah keras, tanah rawa, sungai, hingga perbukitan.

Oleh karena itu, katanya, pembuatan jalan tol akan menggunakan beragam metode, seperti vakum, *elevated*, *file slab* atau tiang pancang metode pengeboran.

Bahkan, dia mengemukakan, pihaknya menyiapkan anggaran yang cukup banyak untuk pengerjaan lahan di wilayah perbukitan di Bengkulu. Pasalnya, HK akan membangun dengan sistem pengeboran untuk terowongan.

Ketua Badan Pelaksana Jalan Tol (BPJT) Danang Perikesit mengatakan, keberadaan tol Sumsel—Bengkulu akan memangkas waktu tempuh yang signifikan dari kondisi saat ini.

"Saat ini dari Palembang ke Muara Enim butuh waktu 4 jam. Nantinya, jika pakai tol waktu tempuhnya hanya 90 menit, jadi ada penghematan hingga 2 jam," katanya.

Dia menambahkan, sementara waktu tempuh dari Palembang ke Bengkulu hanya akan sampai 4 jam dari semula hingga 8 jam—9 jam.

Dana menilai bahwa ruas jalan tol tersebut merupakan skala prioritas karena dapat meningkatkan konektivitas dan arus logistik.

"Di sektor pertanian, pertambangan, dan pariwisata pun dapat meningkat. Hasilnya, dapat mendorong program yang ada di Sumsel," ujarnya. ■

EFISIENSI JALAN TOL TRANS-SUMATRA

Tingkat efisiensi dari investasi atau *internal rate of return* proyek jalan tol Trans-Sumatra belum mencapai titik ideal. Seyogyanya, tingkat keekonomisan pembangunan jalan tol minimal memiliki IRR 18%, sedangkan IRR pada ruas-ruas tol Trans-Sumatra berada di bawah angka tersebut. Itulah alasan mengapa swasta enggan berinvestasi pada mega proyek itu sehingga pemerintah menugaskan pembangunannya kepada PT Utama Karya.

Sumber: Kementerian PUPR, *Bisnis* dan *Seputar*/Kastri Persept

Jalan Tol Trans-Sumatra

● Medan—Banda Aceh	455 km
● Pekanbaru—Medan	546 km
● Palembang—Pekanbaru	600 km
● Lampung—Palembang	360 km
Sub Total	1.961 km

Jalan Tol Pengumpan

● Palembang—Bengkulu	330 km
● Pekanbaru—Padang	240 km
● Tebing Tinggi—Sibolga	200 km
Sub Total	770 km
Total	2.731 km

Judul	Sirip Tol Trans-Sumatra Mulai Digarap	Tanggal	43565
Media	Media Indonesia (Hal. 21)		
Resume	Pengerjaan ruas tol Trans Sumatra di Pulau Sumatra hampir sebagian selesai. Terutama ruas Tol Bakaheuni ke Palembang yang akan dioperasikan Juni 2019.		

PALEMBANG, SUMATRA SELATAN

Sirip Tol Trans-Sumatra Mulai Digarap

PENGERJAAN ruas Tol Trans-Sumatra di Pulau Sumatra hampir sebagian selesai. Terutama ruas Tol Bakaheuni ke Palembang yang diketahui akan dioperasikan pada Juni 2019 mendatang. Karena itu, pemerintah pusat tidak tinggal diam. Sejumlah ruas jalan tol pun kembali dicanangkan dan dimulai pengerjaannya. Salah satunya Tol Sumatra Selatan-Bengkulu sepanjang 329,3 kilometer.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pengerjaan ruas Tol Muara Enim-Simpang Indralaya dan ruas Tol Muara Enim-Lubuklinggau di Muara Enim disegerakan karena banyak hal. Di antaranya,

karena sejumlah ruas di Tol Trans-Sumatra dari Bakaheuni hingga ke Palembang sudah hampir selesai.

"Insya Allah tol dari Bakaheuni hingga ke Palembang akan selesai pada Juni 2019 nanti. Untuk memaksimalkan fungsi tol akan dibangun di ruas siripnya, yakni ke Palembang-Bengkulu. Ini yang kami lakukan. Karena itu, pengerjaannya harus disegerakan," kata Menteri Basuki di Muara Enim, kemarin.

Terkait dengan penetapan lokasi tol, Basuki menerangkan agar pemda setempat dapat memberikan masukan yang diharapkan agar tol ini dapat menghubungkan ruas jalan dengan kawasan industri.

"Tidak ada gunanya tol itu lewat-lewat saja. Harus ada

gunanya. Salah satunya dengan menghubungkan jalan tol dengan kawasan industri," kata Basuki.

Ketua Badan Pelaksana Jalan Tol Danang Parikesit mengatakan tol ini akan dibuka dan dimanfaatkan pada 2022. "Saat ini untuk menuju ke sini (Muara Enim), dari Palembang butuh waktu 4 jam. Jika sudah selesai tolnya, insya Allah waktu tempuh Palembang ke Muara Enim hanya 90 menit hingga 2 jam. Kalau dari Palembang ke Bengkulu, butuh waktu sekitar 4 jam saja," kata dia.

Ia mengakui untuk pengadaaan tanah dimulai April ini. Khusus untuk ruas Tol Muara Enim-Simpang Indralaya dan Tol Muara Enim-Lubuklinggau di Muara Enim, investasinya

senilai Rp47,9 triliun.

Ada 6 simpang susun dalam ruas tol tersebut, yakni simpang susun Indralaya, simpang susun Prabumulih, simpang susun Muara Enim, simpang susun Lahat, simpang susun Musi Rawas, dan simpang susun Lubuklinggau.

"Simpang susun ini akan jadi lokasi baru pusat pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemda harus bisa memanfaatkan lokasi ini," kata dia.

Terkait dengan pengusahaan ruas tol ini, tercatat masa konsensi oleh Hutama Karya selama 40 tahun sejak penerbitan surat konstruksi. Ekuitas atau modal Hutama Karya sebesar 70%-80% dan utang sebesar 30%-20%.

Gubernur Sumsel Herman Deru menuturkan, adanya

ruas tol ini merupakan hadiah untuk Provinsi Sumatra Selatan. Presiden Joko Widodo menjadikan Sumsel sebagai lokasi proyek strategis nasional karena ruas tol ini melintasi sejumlah kabupaten dan kota di Sumsel.

Diakuinya, pembangunan tol itu bukan hal sederhana karena cukup banyak kesiapan yang dilakukan banyak pihak. Bahkan penganggarnya pun cukup panjang dan berbelit. "Proyek ini sebentar lagi kita mulai, tapi jalan cepatkah atau jalan lambatkan tergantung masyarakat Muara Enim. Dari keselamatan pekerja, keamanan alat dalam pengerjaan, hingga pembebasan lahan pun tergantung masyarakat kita sendiri," terang Herman Deru. (DW/N-3)